

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tanuwijaya Nomor 7 Tasikmalaya, Telp. (0265) 336438 Fax. (0265) 336438
E-mail : kesbang@tasikmalavakab.go.id Website : kesbang.tasikmalavakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tanuwijaya No. 7 Tasikmalaya, Telepon: (0265) 336438 Faksimili: (0265) 336438,
Website: kesbang.tasikmalayakab.go.id, e-mail: kesbangpol@tasikmalayakab.go.id
Tasikmalaya – 46113

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA

**NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2056
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a.** bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Daerah;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2.** Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3.** Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4.** Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
13. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7048)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun

- 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045
 38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4)
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12)
 47. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

48. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
49. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
50. Surat Edaran nomor : 004 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

PLT. KEPALA BAKESBANGPOL
KAB. TASIKMALAYA,

ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota :

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
5. Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
6. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pengelola Barang Milik Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
8. Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

PLT. KEPALA BAKESBANGPOL
KAB. TASIKMALAYA,

ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

SEKRETARIS

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

PLT. KEPALA BAKESBANGPOL
 KAB. TASIKMALAYA,

ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, RPD Provinsi Jawa Barat 2024–2026, serta RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026. Selain itu, Renja Bakesbangpol Tahun 2026 juga mempertimbangkan hasil capaian dari Renstra Bakesbangpol 2021–2026 dan diarahkan untuk mendukung target pembangunan yang disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 serta rancangan awal Renstra Bakesbangpol Tahun 2025–2029. Hal ini sejalan dengan kondisi masa transisi perencanaan, di mana dokumen Renstra baru masih dalam tahap penyusunan, sehingga Renja 2026 berfungsi sebagai jembatan kesinambungan kebijakan dari periode sebelumnya menuju periode perencanaan berikutnya.

Penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta target kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol. Dokumen ini memuat analisis capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang dihadapi, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, hingga perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan rencana pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga masyarakat, maupun para pemangku

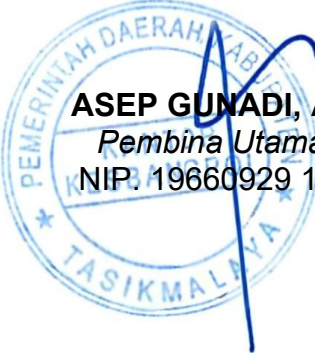
kepentingan lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi yang telah diberikan.

Lebih dari itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2026 sangat bergantung pada komitmen seluruh aparaturnya dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan setiap program dan kegiatan secara konsisten, efektif, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut yang berkesinambungan agar setiap target yang telah dirumuskan dapat tercapai, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi terciptanya stabilitas politik, penguatan demokrasi, dan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Tasikmalaya.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan stabilitas politik, penguatan kehidupan demokrasi, serta ketahanan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol di tahun yang akan datang.

Tasikmalaya, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya



ASEP GUNADI, A.Md., S.Sos.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660929 198710 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	62
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	71
BAB V PENUTUP	95
5.1 Catatan Penting	95
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	95
5.3 Rencana Tindak Lanjut	96
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36
Tabel 2.3	Perbandingan Hasil Analisis dengan Rancangan Awal RKPD	41
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya .	61
Tabel 3.1	Komparasi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, Isu Lokal, dan Implikasi Program Bakesbangpol	64
Tabel 3.2	Sasaran dan Tujuan Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja	69
Tabel 3.3	Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikamalya.....	69
Tabel 3.4	Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikamalya.....	70
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	74
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	76
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	81

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan teknokratis, partisipatif, politis, dan *top-down–bottom-up*, yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perangkat daerah. Proses penyusunan ini terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga menghasilkan dokumen yang komprehensif, realistis, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja PD;
2. Renstra Perangkat Daerah, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang dijabarkan ke dalam Renja PD setiap tahunnya;
3. Renja Perangkat Daerah Provinsi, yang menjadi pedoman sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan lintas daerah, khususnya pada isu strategis yang berskala regional.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, saat ini RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 dan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025–2029 masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2026 masih berpedoman pada dokumen

perencanaan sebelumnya, yaitu RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 dan Renstra Bakesbangpol Tahun 2021–2026.

Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang kemudian dihimpun dan menjadi bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, Renja memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen penghubung antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
13. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4)
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12)
47. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
48. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

49. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
50. Surat Edaran nomor : 004 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Bakesbangpol dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya di bidang ideologi, politik, kehidupan berbangsa, kerukunan umat beragama, serta ketahanan sosial budaya masyarakat.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 ke dalam program dan kegiatan tahunan Bakesbangpol;
2. Merumuskan program, kegiatan, indikator, dan target kinerja yang terukur sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakesbangpol Tahun 2026;
3. Menjadi instrumen penghubung antara dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dengan dokumen penganggaran tahunan (RAPBD);
4. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol dengan kebijakan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bakesbangpol dalam

memberikan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Adapun sistematika penulisan Renja Bakesbangpol Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan rancangan Renja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (2024), perkiraan capaian tahun berjalan (2025), serta keterkaitannya dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 2021–2026. Substansi bab ini meliputi:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan isu

strategis dan keterkaitannya dengan kebijakan nasional, provinsi, serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Substansi bab ini terdiri dari:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, serta pagu indikatif yang disusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Substansi bab ini mencakup:

1) Pertimbangan perumusan program/kegiatan

2) Rencana program/kegiatan dan prakiraan maju

3) Rekapitulasi program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah

BAB V. PENUTUP

Berisi ringkasan dari keseluruhan Renja, yang menegaskan kembali arah kebijakan, tujuan, dan harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta realisasi APBD Tahun 2024. Evaluasi ini juga memperhitungkan perkiraan capaian target kinerja tahun berjalan (2025) yang berpedoman pada APBD yang telah disahkan, serta dikaitkan dengan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Tahun 2021–2026.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat variasi dalam pencapaian target, baik yang belum mencapai target, sesuai target, maupun melebihi target. Hasil revidu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
 - Beberapa indikator capaian masih rendah, misalnya cakupan peningkatan kapasitas ASN hanya terealisasi 0% dari target yang ditetapkan.
 - Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah juga belum terealisasi sesuai target, khususnya pengadaan kendaraan dan peralatan lain.
 - Capaian cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya baru mencapai 0,38%, jauh dari target Renstra.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja
 - Program penunjang urusan pemerintahan daerah menunjukkan capaian yang relatif baik, seperti nilai IKM mencapai 100,97% dan nilai evaluasi SAKIP mencapai 100% dari target.
 - Program peningkatan kewaspadaan nasional serta fasilitasi

penanganan konflik sosial sebagian besar mencapai 100% sesuai target dokumen dan kegiatan koordinasi.

- Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan juga memperlihatkan capaian rata-rata 100% untuk indikator dokumen dan laporan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

- Pada indikator partisipasi politik masyarakat, realisasi tahun 2024 bahkan melampaui target, dengan capaian mencapai 101,25% pada indikator jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik.
- Beberapa indikator koordinasi dan fasilitasi di bidang politik dan demokrasi juga melampaui target yang ditetapkan.

4. Faktor-faktor penyebab capaian

- Belum tercapai: keterbatasan anggaran, perubahan prioritas kegiatan, serta keterbatasan kapasitas SDM.
- Tercapai: konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, koordinasi lintas sektor yang baik, serta dukungan anggaran yang memadai.
- Melebihi target: tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan pendidikan politik dan peningkatan partisipasi pemilih.

5. Implikasi terhadap capaian Renstra

- Capaian kinerja yang belum optimal berimplikasi pada perlunya strategi percepatan pada sisa periode Renstra 2021–2026, khususnya dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta penguatan ideologi Pancasila.
- Sementara itu, capaian yang melebihi target menunjukkan bahwa indikator partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi berpotensi melampaui target Renstra jika konsistensi kinerja dapat dipertahankan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil

- Meningkatkan perencanaan berbasis kinerja dengan memperkuat keterkaitan antara Renja dan pengalokasian anggaran.

- Mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
- Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama dengan stakeholder untuk memperkuat capaian program kewaspadaan nasional, pembinaan ormas, serta ketahanan ekonomi-sosbud.
- Mengembangkan inovasi kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian target Renstra 2021–2026.

Sebagai bahan analisis, capaian kinerja program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			K	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	78	25.057.124.049	75,69	3.877.621.006	77	5.241.516.197	67,15	3.046.561.478	87,21%	75	Poin	75	Poin	100%
		Nilai IKM	Poin	83	7.935.000.000	82,18	1.161.446.722	82,50	1.187.033.280	83,30	2.309.138.400	100,97%	85,10	Poin	85,10	Poin	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	150	450.000.000	28	79.878.000	26	1.187.033.280	26	69.805.000	50,00%	26	Dokumen	26	Dokumen	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	28	250.000.000	6	54.878.000	4	50.000.000	4	50.000.000	50,00%	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	60.000.000	-	-	-	-	-	-		Laporan		Laporan		100%

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	110	140.000.000	22	25.000.000	22	20.000.000	22	19.805.000	50,00%	22	Laporan	22	Laporan	100%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung Jawaban	Persen	500	24.607.124.049	40	3.797.743.006	40	4.054.482.917	24	3.850.776.472	60,00%	100	Persen	100	Persen	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1.800	24.607.124.049	40	3.797.743.006	40	4.054.482.917	40	3.850.776.472	60,00%	360	Orang/ Bulan	360	Orang/ Bulan	100%
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	Persen	500	750.000.000	200	130.000.000	50	50.000.000	-	50.000.000	0,00%	100	Persen	100	Persen	100%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	450.000.000	50	130.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	0,00%	50	Orang	50	Orang	100%
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	150	300.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	40	Orang	40	Orang	100%
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi Umum	Persen	500	2.085.000.000	72	510.716.400	72	657.958.300	36	656.326.500	50,00%	100,00	Persen	100,00	Persen	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	250.000.000	12	84.925.300	12	168.309.200	12	166.759.200	75,00%	12	Paket	12	Paket	100%
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	275.000.000	12	71.700.000	12	57.159.100	12	57.159.100	75,00%	12	Paket	12	Paket	100%
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	60	150.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	75,00%	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	130.000.000	12	34.025.000	12	58.000.000	12	58.000.000	75,00%	12	Laporan	12	Laporan	100%

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	60	900.000.000	12	187.976.100	12	270.000.000	12	269.918.200	75,00%	12	Laporan	12	Laporan	100%
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	380.000.000	12	102.090.000	12	74.490.000	12	74.490.000	75,00%	12	Paket	12	Paket	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men			12	50.000.000	-	-	-	0,00%		Dokumen		Dokumen	100%	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Perse n	300	2.350.000.000	100,00	-	-	-	-	0,00%	11	Persen	11	Persen	100%	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	500.000.000	-	-	-	-	-	0,00%		Unit		Unit	100%	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	350.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	3	Unit	3	Unit	100%	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	1.500.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	8	Unit	8	Unit	100%	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse n	500	1.000.000.000	100%	107.120.322	24	168.839.980	12	161.855.006	50,00%	100	Persen	100	Persen	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	60	225.000.000	12	22.420.322	12	33.021.980	12	26.205.006	100,00 %	12	Laporan	12	Laporan	100%

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	775.000.000	12	84.700.000	12	135.818.000	12	135.650.000	100,00 %	12	Laporan	12	Laporan	100%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	500	1.750.000.000	100%	413.610.000	26	310.235.000	6	543.011.900	23,08%	100	Persen	100	Persen	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	150.000.000	-	-	15	310.235.000	15	309.799.900	60,00%	20	Unit	20	Unit	100%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	950.000.000	20	293.160.000	-	-	-	-	0,00%		Unit		Unit	100%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	225.000.000	10	20.450.000	-	-	-	-	0,00%		Unit		Unit	100%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	425.000.000	10	100.000.000	1	233.212.000	2	233.212.000	100,00 %	1	Unit	1	Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana PendukungGedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					10	65.000.000	10	65.000.000	30,00%	10	Unit	10	Unit	100%

II	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kaulitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perse n	500 %	67.555.000.000	100%	7.619.331.100	100	19.513.400.000	0,934 13844	16.932.254.000	0,93%	100%	Persen	100%	Persen	100%
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen/Lapor an	Doku men	116	4.555.000.000	12	520.000.000	24	1.208.400.000	20	779.509.000	83,33%	24	Dokumen	24	Dokumen	100%
		Jumlah orang	Oran g	18.8 00	63.000.000.000	8.000	7.099.331.100	5.31 0	18.305.000.000	3575	16.152.745.000	67,33%	4.800	Orang	4.800	Orang	100%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Doku men	64	400.000.000	-	-	-	-	-	0,00%		Dokumen		Dokumen	100%	

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Doku men	8	500.000.000	-				-	-	0,00%		Dokumen	Dokumen	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	15.000	7.000.000.000	1.000	449.894.800	2.460	1.030.000.000	1.250	1.028.425.000	50,81%	3.500	Orang	3.500	Orang	100%

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	3.800	56.000.000.000	7.000	6.649.436.300	2.850	17.275.000.000	2.850	16.882.160.000	70,88%	1.300	Orang	1.300	Orang	100%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	36	2.455.000.000	12	520.000.000	12	370.000.000	12	338.320.000	66,67%	12	Laporan	12	Laporan	100%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	1.200.000.000			12	838.400.000	12	838.300.000	75,00%	12	Dokumen	12	Dokumen	100%

II.2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	Perse n	500	71.509.953.000	100%	9.012.052.402	100, 00	90.148.489.476	0,97	87.533.123.388	0,97%	100%	Persen	100%	Persen	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen	Doku men	40	6.570.000.000	14	247.150.000	14	1.455.000.000	9,00	753.390.050	64,29%	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang	Oran g	72.0 00	64.939.953.000	4.000	8.764.902.402	26.0 00	88.693.489.476	26325	86.779.733.338	101,25 %	52.90 0	Orang	52.90 0	Orang	100%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Doku men	6	450.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	2	Dokumen	2	Dokumen	100%

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	8	4.800.000.000	2	197.150.000	2	425.000.000	2	424.450.000	100,00 %	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	10.700	12.439.953.000	1.000	5.068.129.000	1.000	5.270.459.333	1.000	5.270.459.329	82,50%	2.900	Orang	2.900	Orang	100%

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	61.300	52.500.000.000	3.000,00	3.696.773.402	25.000	83.423.030.143	25.000	83.417.789.607	102,00 %	50.000	Orang	50.000	Orang	100%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	26	1.320.000.000	12	50.000.000	12	1.030.000.000	12	1.024.236.403	75,00%		Laporan		Laporan	100%
II.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	Persen	500 %	34.610.350.000	100%	11.873.488.000	100,00	18.327.000.000	0,78	94.568.996	0,78%	100%	Persen	100%	Persen	100%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen/laporan	Dokumen	68	3.095.850.000	12	99.488.000	14	285.000.000	10	94.568.996	71,43%	12	Dokumen	12	Dokumen	100%

		Jumlah orang	Orang	3.100	31.514.500.000	300	11.774.000.000	200	18.042.000.000			87,50%	5.000	Orang	5.000	Orang	100%
	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	32	500.000.000		-			-	-	0,00%		Dokumen		Dokumen	100%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	1.020.000.000	-		2		-	-	0,00%		Dokumen		Dokumen	100%
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.300	30.510.000.000	300	11.774.000.000	200	18.042.000.000	195	17.407.000.000	97,50%	3.000	Orang	3.000	Orang	100%

	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.800	1.004.500.000					-	-	0,00%	2.000	Orang	2.000	Orang	100%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	26	1.575.850.000	12	99.488.000	12	285.000.000	9	280.510.496	75,00%	12	Laporan	12	Laporan	100%
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	500%	105.825.000.000	0	900.000.000	98,00	2.289.250.000	-	1.601.928.500	0,38%	100%	Persen	100%	Persen	100%
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen/laporan	Dokumen	34	2.225.000.000	12	50.000.000	12	89.250.000	9,00	-	75,00%	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
		Jumlah orang	Orang	6.936	103.600.000.000	1.700	850.000.000	4,400	2.200.000.000			71,14%	11.900	Orang	11.900	Orang	100%

1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Doku men	10	475.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Doku men	8	800.000.000	-	-	-	-	-	0,00%		Dokumen		Dokumen	100%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.23 6	100.750.000.000	1.700	850.000.000	2.00 0	1.000.000.000	2.000	996.605.000	95,00%	11.50 0	Orang	11.50 0	Orang	100%

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	5.700	2.850.000.000	-		2.400	1.200.000.000	2.400	1.188.505.000	51,04%	400	Orang	400	Orang	100%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	24	950.000.000	12	50.000.000	12	89.250.000	12	63.750.000	75,00%		Laporan		Laporan	100%
III.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Person	500 %	11.820.000.000	-	1.861.569.200	100,00	3.536.000.000	0,25	1.772.854.950	0,25%	100%	Persen	100%	Persen	100%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen/laporan	Dokumen	16	1.470.000.000	12,00	80.000.000	12,00	51.000.000	9,00	30.800.000	75,00%	14	Dokumen	14	Dokumen	100%
		Jumlah orang	Orang		9.300.000.000	3.500	1.781.569.200	6.970,00	3.485.000.000	3480	1.742.054.950	49,93%	4300	Orang	4300	Orang	100%
		Jumlah Keluarga	Keluarga		1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%		Keluarga		Keluarga	100%

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Doku men	64	400.000.000					-	-	0,00%		Dokumen		Dokumen	100%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan/Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Doku men	8	400.000.000					-	-	0,00%	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	9.600	4.800.000.000	1.400	699.850.000	2.670	1.335.000.000	2.670	1.334.894.950	57,87%	2.100	Orang	2.100	Orang	100%

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	6.600	4.500.000.000	2.100	1.081.719.200	4.300	2.150.000.000	4.300	2.148.390.000	46,51%	2.200	Orang	2.200	Orang	100%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	30	670.000.000	12	80.000.000	12	51.000.000	12	51.000.000	75,00%	12	Laporan	12	Laporan	100%
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	2.100	1.050.000.000					-	-	0,00%		Keluarga		Keluarga	100%

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25.057.124.049,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.877.621.006,- atau 15,47%. Secara umum, capaian outcome program ditunjukkan melalui Nilai Evaluasi SAKIP yang terealisasi 75,69 poin dari target 78 poin atau 97,05%, serta Nilai IKM yang terealisasi 82,18 poin dari target 83 poin atau 99,01%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Kegiatan ini mendapat anggaran sebesar Rp 450.000.000,- dengan realisasi Rp 79.878.000,- atau 17,75%.

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 250.000.000,-, realisasi Rp 54.878.000,- (21,95%). Output berupa 4 dokumen perencanaan dari target 28, sehingga tingkat capaian hanya 14,29%. Outcome: tersusunnya sebagian dokumen perencanaan, namun belum sesuai target yang ditetapkan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD tidak terealisasi sama sekali pada tahun 2024. Outcome: tidak tersedianya laporan koordinasi sebagaimana target.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 140.000.000,-, realisasi Rp 25.000.000,- (17,86%). Output berupa 22 laporan evaluasi dari target 110, capaian 20%. Outcome: evaluasi kinerja baru dilaksanakan sebagian.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dengan anggaran Rp 24.607.124.049,-, realisasi Rp 3.797.743.006,- (15,43%).

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp 3.797.743.006,- (15,43%). Output berupa 40

penerima (dari target 1.800), atau capaian 2,22%. Outcome: hak ASN terpenuhi sebagian, namun realisasi belum optimal.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini mendapat anggaran Rp 750.000.000,-, realisasi Rp 130.000.000,- (17,33%).

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ASN terealisasi Rp 130.000.000,- untuk 50 peserta dari target 150 (33,33%). Outcome: peningkatan kapasitas ASN belum tercapai optimal.
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas tidak terealisasi sama sekali. Outcome: kebutuhan pakaian dinas ASN tidak terpenuhi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan Rp 2.085.000.000,- dengan realisasi Rp 510.716.400,- (24,49%).

Beberapa sub kegiatan seperti penyediaan peralatan kantor, barang cetakan, bahan bacaan, kunjungan tamu, rapat koordinasi, bahan logistik kantor sebagian besar mencapai 50–75% dari target output. Outcome: pelayanan administrasi umum tetap berjalan meskipun capaian target belum sepenuhnya optimal.

B. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 67.555.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.619.331.100,- atau 11,28%. Outcome utama program adalah Cakupan peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi konflik sosial yang ditargetkan 500%, sementara realisasi tahun 2024 mencapai 100% atau sesuai target.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Anggaran Rp 4.555.000.000,-, realisasi Rp 520.000.000,-

(11,42%).

- Sub kegiatan penyusunan dokumen/laporan terealisasi 20 dokumen dari target 24 (83,33%). Outcome: sebagian besar dokumen kebijakan berhasil disusun meskipun belum penuh.
- Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik terealisasi 1.250 orang dari target 2.460 orang (50,81%). Outcome: pelibatan masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan masih terbatas.
- Sub kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terealisasi 12 laporan dari target 12 (100%). Outcome: evaluasi berjalan sesuai target.
- Sub kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah terealisasi 12 dokumen dari target 12 (100%). Outcome: koordinasi lintas unsur pimpinan daerah berjalan baik.

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, dan Demokrasi: Anggaran Rp 71.509.953.000,-, realisasi Rp 9.012.052.402,- (12,61%).

- Sub kegiatan penyusunan kebijakan teknis terealisasi 9 dokumen dari target 14 (64,29%). Outcome: penyusunan masih belum maksimal.
- Sub kegiatan pelaksanaan pendidikan politik terealisasi 26.325 orang dari target 26.000 (101,25%). Outcome: capaian melebihi target, menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat.
- Sub kegiatan koordinasi bidang politik dan demokrasi terealisasi 25.000 orang dari target 24.500 (102%). Outcome: capaian melampaui target.
- Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan politik terealisasi

12 laporan dari target 12 (100%). Outcome: kegiatan evaluasi politik terlaksana sesuai target.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 71.509.953.000,- dengan realisasi Rp 9.012.052.402,- atau 12,61%. Outcome utama berupa cakupan partisipasi politik masyarakat ditargetkan 500%, dan realisasi tahun 2024 tercatat 100% (sesuai target).

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran Rp 34.610.350.000,-, realisasi Rp 11.873.488.000,- (34,31%).

- Sub kegiatan perumusan kebijakan ormas terealisasi 10 dokumen dari target 14 (71,43%). Outcome: capaian mendekati target.
- Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan ormas terealisasi 195 orang dari target 200 (97,50%). Outcome: kebijakan terlaksana hampir sepenuhnya.
- Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ormas terealisasi 9 laporan dari target 12 (75%). Outcome: kegiatan monitoring berjalan sebagian besar sesuai target.

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 105.825.000.000,- dengan realisasi Rp 900.000.000,- atau 0,85%. Outcome utama berupa cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya ditargetkan 500%, sementara realisasi tahun 2024 hanya 0,38%, sehingga jauh dari target.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Anggaran: Rp 2.225.000.000,-. Realisasi: Rp 50.000.000,- (2,25%). Output: 9 dokumen dari target 12 (75%).

Outcome: penyusunan dokumen kebijakan sebagian tercapai, namun belum konsisten karena keterbatasan anggaran.

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Anggaran: Rp 103.600.000.000,-
 Realisasi: Rp 850.000.000,- (0,82%)
 Output: 4.400 peserta dari target 6.936 (63,45%). Outcome: partisipasi masyarakat cukup tinggi, namun capaian masih jauh dari target Renstra.
2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Anggaran: Rp 950.000.000,-
 Realisasi: Rp 50.000.000,- (5,26%)
 Output: 12 laporan dari target 24 (50%). Outcome: sebagian kegiatan evaluasi dan pelaporan berhasil dilakukan, meski belum penuh.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 34.610.350.000,- dengan realisasi Rp 11.873.488.000,- atau 34,31%. Outcome berupa cakupan pemberdayaan dan pengawasan ormas ditargetkan 500%, dan realisasi tahun 2024 mencapai 100%.

F. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.820.000.000,- dengan realisasi Rp 1.861.569.200,- atau 15,75%. Outcome berupa *cakupan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan* ditargetkan 500%, sementara realisasi tahun 2024 hanya 0,25%, sehingga masih sangat rendah.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 Anggaran: Rp 1.470.000.000,-
 Realisasi: Rp 80.000.000,- (5,44%)
 Output: 9 dokumen dari target 12 (75%). Outcome: capaian dokumen sudah sebagian besar tersusun.
2. Kegiatan Pelaksanaan Ideologi dan Karakter Kebangsaan
 Anggaran: Rp 9.300.000.000,-

Realisasi: Rp 1.781.569.200,- (19,15%)

Output: 3.480 peserta dari target 6.970 (49,93%). Outcome: capaian partisipasi masih rendah, sehingga perlu strategi peningkatan.

3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ideologi Pancasila

Anggaran: Rp 670.000.000,-

Realisasi: Rp 80.000.000,- (11,94%)

Output: 12 laporan dari target 30 (40%). Outcome: pengawasan berjalan sebagian, namun belum optimal.

4. Kegiatan Pembentukan Karakter Keluarga melalui Penghayatan Pancasila

Anggaran: Rp 1.050.000.000,-

Realisasi: nihil (0%).

Output: belum ada keluarga yang menjadi sasaran kegiatan.

Outcome: target pembentukan karakter keluarga tidak terlaksana pada tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan dapat memenuhi target Renstra 2021–2026 dan memberikan proyeksi terhadap capaian tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya.

Fungsi Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta penjabaran dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bakesbangpol mempunyai fungsi utama:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, fasilitasi kehidupan politik dan demokrasi, pembinaan partai politik dan organisasi masyarakat, peningkatan kewaspadaan nasional, serta pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
4. Fasilitasi urusan pemerintahan umum terkait ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional.

Dengan fungsi tersebut, indikator kinerja pelayanan Bakesbangpol diarahkan untuk mendukung terciptanya stabilitas politik, ketahanan nasional, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelayanan tersebut, berikut disajikan Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yang menggambarkan target Renstra, realisasi, serta proyeksi kinerja hingga tahun 2027.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi Realisasi				Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,50	73,30	74,50	75,20	73,85	74	74,50	75,20		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Poin	84,65	84,90	85,10	85,30	85,07	85,10	85,20	85,50		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, proyeksi capaian tahun 2025, serta tantangan aktual yang berkembang di masyarakat. Isu-isu ini akan menjadi pijakan strategis dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis

Bakesbangpol telah menunjukkan peningkatan kinerja, antara lain melalui pencapaian nilai SAKIP yang konsisten naik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang relatif tinggi. Namun, terdapat beberapa hal kritis yang harus menjadi perhatian:

- Masih terdapat program strategis dengan capaian rendah, terutama pada ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta penguatan ideologi Pancasila.
- Partisipasi politik masyarakat meningkat, tetapi kualitas pendidikan politik belum optimal, sehingga etika politik dan kesadaran berdemokrasi masih lemah.
- Kinerja deteksi dini konflik sosial relatif baik, tetapi kemampuan analisis dan respons cepat masih perlu ditingkatkan.

2. Permasalahan dan Hambatan

- Kelembagaan: meskipun status kelembagaan telah menjadi “Badan”, masih terdapat keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM. Distribusi pegawai belum seimbang, dengan penumpukan di Subbag Umpeg, sementara Subbag Program, Anggaran, dan Keuangan kekurangan tenaga.
- Ketidadaan jabatan fungsional tertentu: misalnya tidak ada analis ormas dan pengelola hibah, padahal kegiatan hibah menjadi program dengan pagu terbesar.
- Kompetensi SDM: meskipun jumlah pegawai relatif cukup, namun

kompetensi teknis di bidang intelijen daerah, politik dalam negeri, dan pengawasan ormas masih terbatas.

- Koordinasi lintas sektor: masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, terutama dalam penanganan isu narkoba, radikalisme, dan konflik sosial.

3. Dampak terhadap Visi, Misi, dan Capaian Program Nasional/ Internasional

- Terhadap visi dan misi kepala daerah, isu lemahnya wawasan kebangsaan dan pendidikan politik dapat menghambat upaya mewujudkan masyarakat yang religius, demokratis, dan berdaya saing.
- Terhadap program nasional, seperti NSPK dan SPM, Bakesbangpol dituntut untuk memperkuat fungsi pencegahan konflik sosial, pembinaan politik, serta fasilitasi ormas.
- Terhadap SDGs, kinerja Bakesbangpol berkaitan erat dengan Tujuan 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), yaitu terwujudnya masyarakat damai dan inklusif. Hambatan dalam peningkatan kapasitas deteksi dini dan pendidikan politik dapat mengganggu kontribusi Bakesbangpol dalam pencapaian target SDGs di daerah.

4. Tantangan dan Peluang

- Tantangan: meningkatnya ancaman radikalisme, polarisasi politik menjelang Pemilu/Pilkada 2029, serta maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selain itu, derasnya arus informasi digital berpotensi memunculkan hoaks, ujaran kebencian, dan konflik horizontal.
- Peluang: tingginya antusiasme masyarakat dalam kegiatan politik dan pendidikan kebangsaan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dukungan pemerintah daerah terhadap stabilitas politik juga memberi ruang bagi Bakesbangpol untuk memperluas kolaborasi lintas sektor.

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Berdasarkan evaluasi, hambatan, dan tantangan di atas, dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Renja Tahun 2026, yaitu:

- 1) Penguatan kelembagaan dan tata kelola Bakesbangpol, termasuk penataan SDM sesuai kebutuhan jabatan fungsional serta peningkatan kapasitas pegawai.
- 2) Optimalisasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda, untuk memperkuat etika politik, kesadaran demokrasi, dan kebangsaan.
- 3) Peningkatan kapasitas deteksi dini dan cegah dini konflik sosial, melalui sistem informasi, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam membangun kewaspadaan nasional, pembauran kebangsaan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana edukasi politik, literasi kebangsaan, serta kontra narasi radikalisme.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara rumusan program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah sebagaimana dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Proses reviu ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Bakesbangpol tidak hanya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan aktual dan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Tasikmalaya.

Proses reviu ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menjamin keselarasan antara rancangan awal RKPD dengan Renstra Bakesbangpol, serta isu strategis yang muncul dari evaluasi kinerja

tahun sebelumnya.

2. Mengidentifikasi perbedaan berupa adanya program/kegiatan baru yang belum termuat dalam rancangan awal RKPD, maupun adanya kesenjangan dalam hal target, indikator, dan alokasi anggaran.
3. Memberikan catatan strategis sebagai masukan bagi penyempurnaan RKPD, sehingga hasil perencanaan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan stabilitas politik, ketahanan nasional, dan kualitas pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan hasil revidi, ditemukan beberapa hal penting:

- Sebagian besar program dan kegiatan Bakesbangpol telah tercantum dalam rancangan awal RKPD, meskipun terdapat perbedaan pada alokasi anggaran.
- Terdapat beberapa usulan kegiatan tambahan, khususnya yang terkait dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi politik berbasis digital, yang belum seluruhnya diakomodasi dalam rancangan awal RKPD.
- Beberapa indikator kinerja dalam rancangan awal RKPD masih perlu penyesuaian agar konsisten dengan IKU, IKK, dan SPM Bakesbangpol.

Dengan demikian, revidi ini menghasilkan catatan bahwa meskipun arah kebijakan telah sejalan, perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan agar lebih adaptif terhadap tantangan aktual, seperti meningkatnya polarisasi politik, penyebaran paham radikal, serta ancaman narkoba di kalangan generasi muda.

Sebagai rangkuman dari proses revidi, berikut disajikan Tabel 2.3 yang memuat hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya:

**Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				22.696.147.527		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				22.696.147.527	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				22.521.147.527		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				22.521.147.527	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				22.521.147.527		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				22.521.147.527	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi SAKIP Nilai IKM Perangkat Dearah	70 poin 80 poin	5.995.918.413	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi SAKIP Nilai IKM Perangkat Dearah	70 poin 80 poin	5.995.918.413	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	24 Dokumen	75.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	24 Dokumen	75.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	25.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	25.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100 persen	4.242.918.413		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100 persen	4.242.918.413	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.242.918.413		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.242.918.413	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN Bakesbangpol	100 persen	150.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN Bakesbangpol	100 persen	150.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	150.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 persen	620.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100 persen	620.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	100 persen	125.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa	100 persen	125.000.000	

			Pemerintahan Daerah						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	283.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	283.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	500.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	500.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	250.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	250.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	100.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	100.000.000	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 persen	2.625.000.000	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 persen	2.625.000.000	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah dokumen/laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah orang	15 Dokumen 2100 Orang	2.625.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah dokumen/laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah orang	15 Dokumen 2100 Orang	2.625.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	25.000.000		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	25.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	-		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	-	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	800.000.000		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	800.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	900.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	900.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	50.000.000		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	50.000.000	
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	1000 Orang	800.000.000		Pembentukan Paskibraka	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	1000 Orang	800.000.000	

	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	200 Dokumen	50.000.000		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	200 Dokumen	50.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	100 persen	5.990.280.000	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	100 persen	5.990.280.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 12800 Orang	5.990.280.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 12800 Orang	5.990.280.000	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11600 Orang	5.675.120.000		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11600 Orang	5.675.120.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2000 Orang	265.160.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2000 Orang	265.160.000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	50.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	50.000.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	100 persen	1.387.600.000	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	100 persen	1.387.600.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 15200 Orang	1.387.600.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 15200 Orang	1.387.600.000	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5000 Orang	1.300.000.000		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5000 Orang	1.300.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	37.600.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	37.600.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	50.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	50.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	850.000.000	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	850.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 2100 Orang	850.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 2100 Orang	850.000.000	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	600.000.000		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	600.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	200.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	200.000.000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	50.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	50.000.000	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100 persen	5.847.349.114	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100 persen	5.847.349.114	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 7000 Orang	5.847.349.114		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 7000 Orang	5.847.349.114	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3000 Orang	1.000.000.314		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3000 Orang	1.000.000.314	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4000 Orang	4.247.348.800		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4000 Orang	4.247.348.800	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	100.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	100.000.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000.000		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya secara rutin melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, masukan dari LSM, asosiasi profesi, perguruan tinggi, maupun hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Proses penelaahan usulan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi usulan dari hasil Musrenbang desa/kecamatan, pokok pikiran DPRD, serta masukan masyarakat lainnya.
2. Klarifikasi dan verifikasi terhadap relevansi usulan dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol, terutama dalam lingkup pendidikan politik, pemberdayaan ormas, peningkatan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, dan ketahanan sosial budaya.
3. Analisis kesesuaian usulan dengan isu-isu strategis Bakesbangpol, serta keterhubungannya dengan dokumen perencanaan daerah maupun program nasional.

Namun demikian, berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2026, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan masyarakat yang secara langsung ditujukan kepada Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini mengindikasikan dua hal:

- Pertama, program dan kegiatan Bakesbangpol yang selama ini dilaksanakan relatif sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sehingga tidak banyak muncul usulan tambahan.
- Kedua, bidang tugas Bakesbangpol yang lebih banyak bersifat fasilitasi, koordinasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan, membuat masyarakat cenderung tidak mengusulkan program/kegiatan secara langsung, berbeda dengan perangkat daerah yang memberikan layanan publik dasar.

Walaupun tidak terdapat usulan baru, Bakesbangpol tetap menjadikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi (sebagaimana diuraikan pada sub bab 2.3) sebagai dasar dalam menyusun program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan perangkat daerah, termasuk Renja Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, harus menyelaraskan program dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui sinkronisasi multi-level ini, setiap program bertaut langsung dengan prioritas pembangunan pusat maupun daerah.

A. Kebijakan Nasional: RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kemendagri

RPJMN 2025–2029, dirumuskan dalam Perpres No. 12 Tahun 2025, merupakan fondasi awal menuju Visi Indonesia Emas 2045 — visi pemerintah landasan pembangunan berorientasi jangka panjang. Dokumen ini mendorong delapan prioritas nasional (Asta Cita), yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM – mendasari peran Bakesbangpol dalam pendidikan politik beretika dan penguatan wawasan kebangsaan.
2. Stabilitas dan Ketahanan Nasional – menekankan peran deteksi dini terhadap konflik, intoleransi, radikalisme, dan menjaga stabilitas sosial-politik
3. Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola – termasuk reformasi birokrasi dan pemerintahan digital, sejalan dengan kebutuhan Bakesbangpol untuk memperkuat layanan publik berbasis digital
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi – relevan dalam mendorong kohesi sosial, moderasi beragama, dan harmonisasi budaya dalam masyarakat

Renstra Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) melengkapi acuan teknis, menekankan penguatan kapasitas daerah dalam fasilitasi ormas, partai politik, dan demokrasi sehat—sejalan

dengan RPJMN dan menjadi sumber utama kebijakan bagi Bakesbangpol.

B. Kebijakan Provinsi Jawa Barat: RPD/RPJMD 2024–2026 dan 2025–2029

Visi “Jabar Istimewa” pada RPJMD Jawa Barat menargetkan kondisi unggul (istimewa) dalam pelayanan publik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya (termasuk moderasi beragama dan kerukunan). Tiga pijakan strategi utama bagi daerah:

1. Wawasan Kebangsaan dan Karakter – menguatkan nilai sosial, Pancasila, dan kerukunan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.
2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah – termasuk penataan kelembagaan, digitalisasi layanan, dan penguatan kapasitas SDM.
3. Pemberdayaan Ormas dan Partai Politik; Pencegahan Konflik Sosial dan Narkoba – relevan dalam menjaga stabilitas sosial politik dan mitigasi masalah narkoba.

RPJMD juga menekankan perlunya penyempurnaan pelayanan pemerintahan dan mempersempit kesenjangan—dengan peran Bakesbangpol penting dalam fasilitasi ormas, pendidikan politik, dan penyebaran moderasi nilai.

C. Sinkronisasi Arah Kebijakan

Sinkronisasi pusat–provinsi–daerah menjadi pijakan strategis dalam penyusunan Renja 2026:

- Dimensi Ideologis dan Demokrasi: Mengintegrasikan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang etis dan inklusif—sesuai prioritas nasional dan provinsi.
- Dimensi Stabilitas dan Ketahanan: Menjalankan fungsi deteksi dini konflik dan memperkuat FKDM serta Forkopimda sebagai sistem kewaspadaan sosial.
- Dimensi Tata Kelola dan SDM: Melakukan penataan kelembagaan,

pengembangan kompetensi SDM, dan pemanfaatan digital tools untuk efisiensi kinerja Bakesbangpol.

Melalui pendekatan ini, Bakesbangpol dapat menjadi instrumen penghubung tanggap antara kebijakan makro dan kebutuhan lokal, khususnya dalam bidang demokrasi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan sosial budaya.

Tabel 3.1
Telaahan Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Isu Lokal terhadap Program Bakesbangpol 2026

RPJMN 2025–2029 (Asta Cita & Prioritas Nasional)	RPD/RPJMD Jawa Barat 2024–2026	Isu Lokal Kabupaten Tasikmalaya	Implikasi ke Program Bakesbangpol 2026
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	Penguatan wawasan kebangsaan & karakter masyarakat Jabar	Lemahnya pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya generasi muda	Program pendidikan politik & wawasan kebangsaan; peningkatan literasi demokrasi di kalangan pelajar/mahasiswa
Memperkuat stabilitas politik & ketahanan nasional	Stabilitas sosial dan pencegahan konflik	Masih adanya potensi konflik sosial, intoleransi, serta kerawanan politik	Program deteksi dini & cegah dini konflik; penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forkopimda
Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Struktur kelembagaan relatif sudah sesuai, tetapi distribusi & kompetensi SDM belum optimal	Program penguatan kelembagaan & peningkatan kapasitas SDM Bakesbangpol (pelatihan, penataan peta jabatan, digitalisasi layanan)
Pembangunan sosial budaya yang inklusif & harmonis	Pemberdayaan ormas & partai politik	Partisipasi ormas & parpol belum optimal; ada masalah tata kelola hibah ormas	Program fasilitasi ormas & parpol; peningkatan akuntabilitas hibah; pembinaan kelembagaan masyarakat
Pencegahan peredaran narkoba & ancaman non-tradisional	Penguatan masyarakat tangguh narkoba	Meningkatnya pengguna dan kasus narkoba di Tasikmalaya	Program pencegahan narkoba berbasis masyarakat; kolaborasi multipihak dengan BNN, kepolisian, ormas, dan lembaga pendidikan

Berdasarkan telaahan kebijakan nasional, provinsi, dan isu lokal Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, pada dimensi ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, kebijakan nasional melalui RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan demokrasi yang berlandaskan etika politik dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat. Di Kabupaten Tasikmalaya, persoalan yang masih menonjol adalah lemahnya pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, yang tercermin dari rendahnya partisipasi politik dan mudahnya mereka terpapar paham intoleransi. Implikasi dari hal ini adalah perlunya Bakesbangpol merancang program pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang lebih inovatif dan berbasis kelompok sasaran pemula, misalnya melalui kurikulum tambahan, pelatihan kader kebangsaan, serta pemanfaatan media digital.

Kedua, pada aspek stabilitas politik dan ketahanan nasional, kebijakan pusat dan provinsi sama-sama menekankan pentingnya menjaga kondusifitas sosial dan mencegah konflik. Tasikmalaya sebagai daerah dengan keragaman sosial budaya menghadapi tantangan berupa kerawanan konflik horizontal, intoleransi, dan dinamika politik lokal. Oleh karena itu, Bakesbangpol harus memperkuat fungsi deteksi dini dan cegah dini konflik melalui optimalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda, serta peningkatan kapasitas aparaturnya dan jejaring masyarakat dalam manajemen konflik.

Ketiga, dalam dimensi reformasi politik, hukum, dan birokrasi, RPJMN menekankan transformasi tata kelola pemerintahan, sementara Jawa Barat mengedepankan peningkatan kualitas birokrasi daerah. Isu lokal yang muncul adalah distribusi dan kompetensi SDM Bakesbangpol yang belum sesuai kebutuhan, misalnya tidak adanya analisis ormas dan pengelola hibah meskipun beban program besar di bidang tersebut. Implikasi langsungnya adalah perlunya penguatan kelembagaan dan SDM Bakesbangpol melalui

pelatihan teknis, penataan peta jabatan, dan penerapan digitalisasi sistem perencanaan, monitoring, serta pelaporan kinerja.

Keempat, terkait pembangunan sosial budaya yang inklusif, baik RPJMN maupun RPJMD Jawa Barat menekankan pemberdayaan ormas dan partai politik. Di Tasikmalaya, partisipasi ormas dan parpol masih belum optimal, sementara pengelolaan hibah kepada ormas kerap menghadapi kendala transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, Bakesbangpol perlu melaksanakan program pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan ormas dan parpol dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mendorong kontribusi ormas dalam menjaga stabilitas daerah.

Kelima, pada isu ancaman non-tradisional seperti narkoba, RPJMN maupun kebijakan provinsi Jawa Barat menegaskan perlunya penguatan masyarakat tangguh narkoba. Kondisi di Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan pengguna narkoba dan kasus kriminal terkait narkoba. Hal ini menuntut Bakesbangpol berkolaborasi secara lebih intens dengan BNN, aparat kepolisian, ormas, dan lembaga pendidikan melalui program pencegahan narkoba berbasis masyarakat, seperti kampanye sadar narkoba, pelibatan pemuda dalam gerakan anti-narkoba, dan fasilitasi forum koordinasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, telaahan ini menegaskan bahwa program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 harus mampu menjembatani kebijakan pusat dan provinsi dengan kebutuhan lokal. Sinkronisasi tersebut akan memperkuat peran Bakesbangpol sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas politik, membangun kohesi sosial, memperkuat ideologi Pancasila, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Selain itu, dari hasil telaahan kebijakan nasional, provinsi, dan isu lokal Kabupaten Tasikmalaya, serta analisis pada Tabel 3.1, dapat ditarik beberapa isu prioritas utama yang harus menjadi perhatian Bakesbangpol dalam perencanaan Tahun 2026, yaitu:

1. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Isu ini menjadi prioritas karena lemahnya pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda dan pemilih pemula, masih menjadi tantangan serius. Fenomena rendahnya partisipasi politik, mudahnya terpapar paham intoleransi, serta kurangnya kesadaran akan etika berdemokrasi memperlihatkan perlunya langkah penguatan yang lebih sistematis.

- Implikasi program: Pengembangan pendidikan politik berbasis digital, pelatihan kader kebangsaan, program literasi demokrasi di sekolah dan perguruan tinggi, serta kampanye kebangsaan kolaboratif dengan ormas dan media lokal.

2. Peningkatan Kapasitas Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial

Kondisi sosial Kabupaten Tasikmalaya yang plural berpotensi menimbulkan konflik horizontal, intoleransi, dan gejolak politik lokal. Keterbatasan aparat dalam deteksi dini serta belum optimalnya koordinasi multipihak memperkuat urgensi isu ini.

- Implikasi program: Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pembentukan sistem pelaporan cepat berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam manajemen konflik, serta intensifikasi koordinasi Forkopimda.

3. Penguatan Kelembagaan dan Kompetensi SDM Bakesbangpol

Meskipun status kelembagaan Bakesbangpol sudah berbentuk badan, distribusi dan kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan. Misalnya, tidak adanya jabatan analis ormas maupun pengelola hibah, sementara mayoritas pegawai terkonsentrasi di sekretariat. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program strategis, terutama terkait pengelolaan hibah ormas yang memiliki pagu terbesar.

- Implikasi program: Penataan peta jabatan, peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, rekrutmen atau redistribusi pegawai sesuai kebutuhan strategis, serta penerapan sistem digital untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

Berdasarkan penajaman isu di atas, maka dapat ditegaskan bahwa

Renja Bakesbangpol 2026 perlu diarahkan pada tiga fokus besar:

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi dan wawasan kebangsaan masyarakat, khususnya generasi muda.
- 2) Memperkuat kemampuan deteksi dini dan sistem kewaspadaan daerah dalam menjaga stabilitas politik dan ketahanan sosial.
- 3) Membangun kelembagaan Bakesbangpol yang lebih adaptif, profesional, dan berbasis kompetensi.

Ketiga isu prioritas ini selaras dengan RPJMN 2025–2029, Renstra Kemendagri, serta RPD/RPJMD Jawa Barat 2024–2026, sekaligus menjawab tantangan lokal di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, Bakesbangpol dapat berperan lebih efektif sebagai penyangga stabilitas politik, penggerak demokrasi yang sehat, dan penguat kohesi sosial di daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Renstra Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029. Tujuan merupakan pernyataan arah pembangunan yang bersifat umum dan jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik yang bersifat terukur dari tujuan yang ingin dicapai setiap tahunnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renja Bakesbangpol Tahun 2026 difokuskan pada upaya mewujudkan stabilitas politik dan keamanan daerah, penguatan kapasitas demokrasi dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Bakesbangpol.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan tabel yang memuat keterkaitan antara sasaran daerah, tujuan perangkat daerah, sasaran perangkat daerah, serta indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah:

Tabel 3. 2
Prioritas dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Ketenteraman dan ketertiban umum	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	Berkurangnya potensi konflik sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial
				Bina kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi berdampak	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Bakesbangpol	Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol

Tabel 3.3
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026
1.	Mewujudkan stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan daerah yang kondusif melalui penguatan sistem deteksi dini, cegah dini, serta penanganan potensi konflik sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	20%
2.	Mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat, beretika, serta partisipatif melalui penguatan kelembagaan politik, partai politik, organisasi masyarakat, dan partisipasi publik	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	75%

3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan adaptif di lingkungan Bakesbangpol	Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	70,05
----	---	---	-------

Tabel 3.4
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
1.	Berkurangnya potensi konflik sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	20%
2.	Bina kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi berdampak	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	75%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Bakesbangpol	Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	70,05

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun untuk memperkuat peran strategis perangkat daerah dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memperkuat ketahanan sosial budaya. Penyusunan Renja ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi sasaran internal perangkat daerah, tetapi juga berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi dengan agenda pembangunan nasional, provinsi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

A. Faktor Pertimbangan Perumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 adalah *“Terwujudnya Kabupaten Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Sejahtera untuk Semua”*. Dalam konteks tersebut, Bakesbangpol memiliki kontribusi langsung pada misi peningkatan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya, dan kerukunan masyarakat, serta misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional. Program dan kegiatan Bakesbangpol diarahkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan literasi politik, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum agar visi-misi kepala daerah dapat tercapai.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 menetapkan delapan prioritas pembangunan. Di antara prioritas tersebut, terdapat tiga yang relevan dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol, yaitu:

- Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

- Penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan partisipasi masyarakat.

Program Bakesbangpol diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap prioritas tersebut, melalui penguatan sistem deteksi dini konflik sosial, fasilitasi pendidikan politik, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

3. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Renja Bakesbangpol 2026 juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama SDG's Tujuan 16: Peace, Justice and Strong Institutions, yang menekankan pentingnya membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Selain itu, peran Bakesbangpol juga berkontribusi pada SDG's Tujuan 10: Reduced Inequalities, melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan ormas, dan fasilitasi partisipasi politik yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan

Pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun tidak secara langsung mengelola program ekonomi, Bakesbangpol berperan dalam menciptakan iklim sosial politik yang stabil dan kondusif. Stabilitas sosial dan keamanan merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya investasi, berkembangnya usaha lokal, serta meningkatnya produktivitas masyarakat, sehingga pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam pencapaian SPM, khususnya di bidang kewaspadaan dini dan pencegahan konflik sosial. Program deteksi dini, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan pembinaan organisasi masyarakat menjadi instrumen utama dalam memenuhi standar pelayanan minimal tersebut.

6. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Renja Bakesbangpol 2026 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, antara lain:

- Nilai Reformasi Birokrasi (RB General) sebagai ukuran tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik, termasuk layanan fasilitasi politik dan kebangsaan.
- Indeks Demokrasi dan Partisipasi Politik Masyarakat, yang mencerminkan kualitas kehidupan demokrasi lokal.

7. Pendayagunaan Potensi Ekonomi dan Sosial Daerah

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi besar di sektor UMKM, pertanian, dan wisata. Untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut, Bakesbangpol berperan dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kohesi sosial, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan kondisi sosial politik yang aman dan harmonis, potensi ekonomi daerah dapat berkembang optimal.

8. Faktor Kontekstual dan Isu Aktual Daerah

Selain faktor-faktor di atas, dinamika isu aktual juga menjadi bahan pertimbangan penting. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain masih adanya potensi konflik sosial berbasis identitas, rendahnya literasi politik generasi muda, meningkatnya kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba, serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan Bakesbangpol baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Oleh karena itu, program dan kegiatan 2026 diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM, dan membangun kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan faktor-faktor pertimbangan tersebut, maka rumusan program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis, mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta berkontribusi terhadap prioritas

pembangunan daerah dan target nasional maupun provinsi. Tujuan dan sasaran perangkat daerah kemudian diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur, baik dari sisi indikator kinerja maupun target capaian.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai keterkaitan antara sasaran perangkat daerah dengan program dan kegiatan yang direncanakan, berikut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1	Berkurangnya potensi konflik sosial	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2	Bina kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi berdampak	1. Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3. Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Bakesbangpol	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2026 terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, 39 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 22.696.147.527,00 (Dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Ketenteraman dan ketertiban umum	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.521.147.527,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.995.918.413,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.242.918.413,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.242.918.413,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.000.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000.000,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.625.000.000,00	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.625.000.000,00	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25.000.000,00	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900.000.000,00	

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000,00	
		Pembentukan Paskibraka	800.000.000,00	
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	50.000.000,00	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.990.280.000,00	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.990.280.000,00	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.675.120.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	265.160.000,00	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.000.000,00	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.387.600.000,00	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.387.600.000,00	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.300.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37.600.000,00	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	850.000.000,00	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	850.000.000,00	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000,00	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000,00	

		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.847.349.114,00	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.847.349.114,00	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.000.000.314,00	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.247.348.800,00	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000,00	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
			22.696.147.527,00	

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			22.696.147.527,00							39.828.000.000,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			22.521.147.527,00							39.653.000.000,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			22.521.147.527,00							39.653.000.000,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Nilai IKM Perangkat Dearah	70 poin 80 poin	5.995.918.413,00						-	5.995.918.413,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	24 Dokumen	75.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	-	75.000.000,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100 persen	4.242.918.413,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	-	4.300.000.000,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.242.918.413,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		4.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN Bakesbangpol	100 persen	150.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	-	225.000.000,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 persen	620.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	-	620.000.000,00	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	125.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	-	125.000.000,00	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	283.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	-	283.000.000,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	500.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	-	500.000.000,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	250.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dan Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 persen	2.625.000.000,00						-	2.050.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen/laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah orang	15 Dokumen 2100 Orang	2.625.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	-	2.050.000.000,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	800.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	900.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	1000 Orang	800.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	200 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	100 persen	5.990.280.000,00						-	6.650.000.000,00	

	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 12800 Orang	5.990.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	-	6.650.000.000,00	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11600 Orang	5.675.120.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		5.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2000 Orang	265.160.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	100 persen	1.387.600.000,00						-	14.250.000.000,00	

	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 15200 Orang	1.387.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	-	14.250.000.000,00	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5000 Orang	1.300.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		14.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	37.600.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	850.000.000,00						-	1.650.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 2100 Orang	850.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	-	1.650.000.000,00	
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	600.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	200.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 persen	5.847.349.114,00						-	9.100.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen/laporan Jumlah orang	16 Dokumen 7000 Orang	5.847.349.114,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	-	9.100.000.000,00	
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3000 Orang	1.000.000.314,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4000 Orang	4.247.348.800,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		7.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								22.696.147.527,00							39.828.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bakesbangpol 2021–2026, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024–2026, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

a. Catatan Penting

Dalam pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran menjadi faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Apabila realisasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, maka akan berdampak pada keterbatasan ruang gerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis.
2. Kompleksitas isu-isu sosial politik, seperti potensi konflik sosial, rendahnya partisipasi politik, kerawanan ideologi, serta maraknya peredaran narkoba, menuntut adanya konsistensi kebijakan, dukungan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.
3. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2026 berpedoman pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Menjaga sinkronisasi antara program dan kegiatan perangkat daerah dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.

2. Mengutamakan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mengedepankan prinsip partisipatif, kolaboratif, serta responsif terhadap isu-isu strategis daerah.
4. Mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah, terutama Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, serta peraturan perundangan lainnya yang relevan.

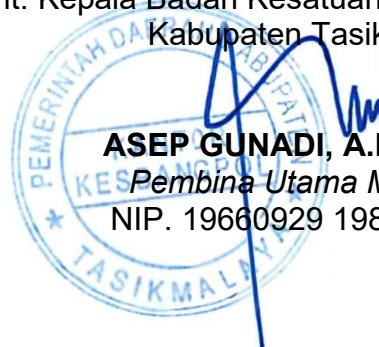
c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Renja ini, Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya akan:

1. Menjabarkan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026.
2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor, baik dengan Forkopimda, OPD lain, maupun dengan organisasi masyarakat, partai politik, dan lembaga pendidikan, guna memastikan keterlaksanaan program secara optimal.
3. Menyusun mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara periodik untuk menjamin ketercapaian sasaran Renja.
4. Melakukan penyesuaian kebijakan dan kegiatan apabila terdapat dinamika baru, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, yang berimplikasi pada pelaksanaan tugas Bakesbangpol.

Tasikmalaya, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya


ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660929 198710 1 002